

BAB II

GAMBARAN UMUM PARTAI DEMOKRAT

2.1. Gambaran Umum dan Dinamika Partai Demokrat

2.1.1 Sejarah Partai Demokrat

Setelah mengalami kekalahan dalam pemilihan Wakil Presiden pada sidang MPR tahun 2001, Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk mengambil inisiatif membentuk partai politik baru yang kini dikenal dengan nama Partai Demokrat.

Pada tahun 2001, berdasarkan hasil survei yang menunjukkan tingginya popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sekelompok individu merasa terpanggil untuk mendukung SBY sebagai calon Presiden, bukan hanya sebagai Wakil Presiden. Untuk mewujudkan tujuan ini, mereka sepakat untuk mendirikan partai politik baru. Tim Krisna Bambu Apus bertanggung jawab merumuskan platform dan konsep dasar partai, sedangkan tim yang dipimpin oleh Vence Rumangkang mengelola aspek administratif partai tersebut.

Pada 12 Agustus 2001, SBY mengadakan rapat di apartemen Hilton dan membuat tim pelaksana untuk menjadwalkan pertemuan setiap hari. Tim ini meliputi, Drs. A. Yani Wahid (Almarhum), Vence Rumangkang, Adhiyaksa Dault, Achmad Kurnia, Shirato Syafei, serta SH, Baharuddin Tonti. Tepatnya di lingkungan kantor Menkopolkampun, terlaksana diskusi-diskusi mengenai pendirian partai untuk kendaraan politik SBY yang dipimpin Drs. A. Yani Wahid (almarhum).

Pada 20 Agustus 2001, Vence Rumangkang, dengan dukungan dari Drs. Sutan Bhatoegana, menginisiasi pengumpulan sejumlah individu guna merealisasikan pendirian partai politik. Upaya tersebut akhirnya melahirkan Tim 9, yang terdiri dari 10 anggota, untuk menyempurnakan konsep pembentukan partai tersebut. Anggota-anggota Tim 9 termasuk Dr. Ahmad Mubarak, MA., Vence Rumangkang, Prof. Dr. Subur Budhisantoso, Drs. A. Yani Wachid (almarhum), RMH. Heroe Syswanto Ns., Prof. Dr. Irzan Tanjung, Prof. Dardji Darmodihardjo, Prof. Dr. RF. Saragih, SH., MH., Prof. Dr. T. Rusli Ramli, MS., dan Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas. Diskusi terakhir terkait konsep partai dipimpin secara langsung oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Kepartaian agar sebuah partai dapat disahkan, dibutuhkan minimal 50 orang sebagai pendiri. Namun, muncul ide untuk meningkatkan jumlah pendiri menjadi 99 orang, yang dianggap memiliki makna simbolis bagi SBY, sang inisiator, yang lahir pada tanggal 9 bulan 9. Pada 9 September 2001, di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan, sebanyak 46 dari 99 orang hadir dan menyatakan kesiapan mereka menjadi pendiri Partai Demokrat, serta menandatangani Akta Pendirian Partai Demokrat di hadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH. Sementara itu, 53 orang lainnya, meskipun tidak hadir, memberikan kuasa kepada Vence Rumangkang untuk menandatangani akta atas nama mereka.

Struktur kepengurusan partai dirancang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yakni calon ketua umum harus merupakan putra asli Indonesia,

lahir di Jawa, dan beragama Islam. Sementara itu, sekretaris jenderal dipilih dari wilayah luar Pulau Jawa dan beragama Kristen. Setelah melalui proses seleksi yang cermat, Vence Rumangkang menunjuk Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai ketua umum sementara, dan Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai sekretaris jenderal sementara. Adapun jabatan bendahara umum dipegang langsung oleh Vence Rumangkang.

Malam itu, sekitar pukul 20.30, Vence Rumangkang menemui SBY di kediamannya untuk melaporkan perkembangan terkait pembentukan partai, tepat pada saat SBY merayakan ulang tahun yang ke-52. Dalam laporannya, Vence menyampaikan bahwa Partai Demokrat akan secara resmi didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM pada keesokan harinya, yakni tanggal 10 September 2001.

Pada tanggal 10 September 2001, tepat pada pukul 10.00 WIB, Vence Rumangkang bersama dengan Prof. Dr. Subur Budhisantoso, Prof. Dr. Irsan Tandjung, Drs. Sutan Bhatogana MBA, Prof. Dr. Rusli Ramli, dan Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH., secara resmi menyerahkan dokumen pendaftaran Partai Demokrat kepada Departemen Kehakiman dan HAM RI. Dokumen tersebut diterima secara formal oleh Kepala SUBDIT Pendaftaran di Departemen Kehakiman dan HAM sebagai bagian dari proses legalisasi partai.

Terkait dari pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat, pada tanggal 25 September 2001, Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 diterbitkan. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, Partai Demokrat secara resmi diakui sebagai partai politik di Indonesia.

2.1.2 Visi dan Misi Partai Demokrat

Berdasarkan informasi yang tercantum di situs resmi Partai Demokrat, terdapat dua kategori visi yang mereka tetapkan: visi untuk kemajuan Indonesia dan visi khusus untuk Partai Demokrat itu sendiri, Adapun visi Partai untuk Indonesia, yakni:

- a. Indonesia sebagai negara maju pada abad ke-21.
- b. Indonesia menjadi negara kuat tahun 2045.
- c. Indonesia menjadi negara *emerging economy* di tahun 2030.

Sedangkan visi Partai Demokrat untuk masa depan adalah sebagai berikut:

- a. Kuat, berintegritas, dan berkapasitas.
- b. Relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman.
- c. Konsisten pada nilai, idealism dan *platform* perjuangan partai yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, kesejahteraan, demokrasi dan kelestarian lingkungan.
- d. Menyatu dengan rakyat dan terus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.
- e. Mempertahankan jati diri sebagai partai Nasionalis-Religius, Partai Terbuka, Partai Tengah, Partai Pluralis dan Partai-Pro Rakyat Kecil.

Sebagai salah satu kekuatan politik utama di tingkat nasional, Partai Demokrat aktif berperan serta dan memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, damai, adil, sejahtera, dan demokratis. Dalam kapasitasnya sebagai partai politik, Partai Demokrat memiliki misi sebagai

berikut:

- a. Memenangkan pemilihan umum pada tingkat nasional, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden.
- b. Memenangkan pemilihan umum tingkat daerah, baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah.
- c. Mempersiapkan kader-kader Demokrat untuk maju sebagai peserta pemilihan umum, baik pusat maupun daerah, baik legislatif maupun eksekutif.
- d. Menjalin komunikasi secara berkelanjutan dengan rakyat guna mengetahui persoalan, harapan dan aspirasi mereka, untuk selanjutnya diperjuangkan di berbagai medan pengabdian dan penugasan partai.
- e. Menjalankan kehidupan internal partai sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga, menuju masa depan Partai Demokrat yang makin kuat, makin modern, makin di cintai rakyat dan makin kontributif bagi pembangunan bangsa.

2.1.3 Lambang Partai Demokrat

Gambar 2. 1
Lambang Partai Demokrat



Sumber: *website Partai Demokrat.*

Lambang Partai Demokrat berbentuk bintang yang memancarkan sinar ke tiga arah dengan warna merah dan putih di kedua sisinya, diletakkan di atas latar belakang biru tua dan biru laut. Bintang berbentuk segitiga berwarna merah dan putih melambangkan persatuan yang kuat, dengan tiga prinsip utama yaitu nasionalisme-religius, humanisme, dan pluralisme. Warna biru laut di tengah lambang melambangkan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan berbangsa serta upaya mencapai cita-cita nasional. Sementara itu, warna biru tua di bagian atas dan bawah menggambarkan keteguhan, solidaritas, kepercayaan diri, dan optimisme dalam perjuangan mencapai tujuan bangsa. Warna merah dan putih di sisi bintang menunjukkan semangat nasionalisme, sementara warna biru mewakili humanisme dalam konteks hubungan internasional dan pluralisme, sesuai dengan visi Partai Demokrat.

2.1.4 Deskripsi dan Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat berada di Jalan Proklamasi No. 41, RW 02, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta, 10320.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, adapun struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, yakni sebagai berikut:

Ketua Umum	:
H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.	
Wakil Ketua Umum	: Dr. Benny Kabur Harman, S.H., M.H.
Wakil Ketua Umum	: Edhie Baskoro Yudhoyono, B.com., M.Sc.
Wakil Ketua Umum	: Dr. Drs. Yansen Tipa Padan, M.Si.
Wakil Ketua Umum	: Hj. Vera Febyanthi Rumangkang, M.Si.
Wakil Ketua Umum	: Willem Wandik, S. Sos.
Wakil Ketua Umum	: Ir. Marwan Cik Asan, M.M.
Sekretaris Jenderal	: H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
Wakil Sekretaris Jenderal	: Ir. Hj. Andi Timo Pangerang
Wakil Sekretaris Jenderal	: Putu Supadma Rudana, M.B.A.
Wakil Sekretaris Jenderal	: Renanda Bachtar
Wakil Sekretaris Jenderal	: Inggrid Kansil, S.Sos.
Wakil Sekretaris Jenderal	: Muhammad Rifai Darus, S.E.
Wakil Sekretaris Jenderal	: Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.H.
Wakil Sekretaris Jenderal	: Imelda Sari, S.S.
Wakil Sekretaris Jenderal	: H. Irwan, S.I.P., M.P.
Wakil Sekretaris Jenderal	: Agus Jovan Latuconsina, M.Si (Han)., M.A.
Bendahara Umum	: H. Renville Antonio, S.H., M.H., M.M.
Wakil Bendahara Umum	: Eka Putra, S.E.
Wakil Bendahara Umum	: Lasmi Indaryani, S.E.
Wakil Bendahara Umum	: Tatyana S. Sutara, S.E., M.Si.

Wakil Bendahara Umum	: Chairul Yaqin Hidayat, S.I.P.
Wakil Bendahara Umum	: Edwin Jannerli Tandjung, S.E.
Wakil Bendahara Umum	: Bramantyo Suwondo, M.M.IR.
Wakil Bendahara Umum	: Indyastari Wikan, S.T., M.T.Ars.
Wakil Bendahara Umum	: Lokot Nasution, S.T.
Direktur Eksekutif	: Sigit Raditya M.I..S., M.A.
Wakil Direktur Eksekutif	: Ir. Irawan Satrio Leksono, M.M.
Wakil Direktur Eksekutif	: Andi Muqsith Mursalim, S.I.P.
Wakil Direktur Eksekutif	: Emir Ahmad Zakaria, S.Kom.

BADAN-BADAN

Badan Pemenangan Pemilu

Kepala	: Andi Arief
Deputi	: M. Oki Isnaini, B.Sc., M.Sc., M.A.
Deputi	: Rezka Octoberia, S.E.
Deputi	: Daisy Margaret Silanno, S.Sn., M.Si.
Deputi	: H. Imer Darius, S.E.
Deputi	: Dr. Dra. Andi Nurpati, M.Pd.
Deputi	: Rizaldi Kadir Situru

Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi

Kepala	:
DR. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si.	
Deputi	: SMR. Edi A., S.Sos., M.P.M.
Deputi	: H. Jemmy Setiawan, S.H., M.H.
Deputi	: Gana Febrana, S.I.P.
Deputi	: Indriani Hadi
Deputi	: Harmusa Oktaviani, S.E.

Badan Penelitian dan Pengembangan

Kepala	:
Herzaky Mahendra Putra, S.Sos., M.M.	
Deputi	: Tomi Satryatomo, S.E.
Deputi	: Syahrial Nasution
Deputi	: Diska Putri Pamungkas, S.I.P, M.Sc.
Deputi	: Yan Amarullah Harahap, S.E., S.H., M.M.
Deputi	: Ajie Arifuddin, S.E., M.M.

Badan Komunikasi Strategis

Kepala	: Ossy Dermawan, B.S, M.Sc.
Deputi	: Ni Luh Putu Caosa Indryani, S.I.P.,
M.MM.	
Deputi	: Cipta Panca Laksana
Deputi	: Yoyo Budianto
Deputi	: Ricky Kurniawan Chairul, S.E.
Deputi	: Gemintang Kejora Mallarangeng,
M.A.	

Badan Doktrin, Pendidikan, dan Pelatihan

Kepala	:
Yudha Pratomo Mahyuddin, M.Sc., Ph.D.	
Deputi	: Imam Subkhan, M.Hum., M.A.
Deputi	: Dani Miftakhul Akhyar, S.T., M.Si.
Deputi	: H. Iwan Rinaldo Syarief, S.E.
Deputi	: Hilda Thawila, S.Sos.
Deputi	: Panji Purboyo, S.E.

Badan Pembinaan Jaringan Konstutien

Kepala	: Zulfikar Hamonangan, S.H.
Deputi	: Steven J. Rumangkang, B.A.
Deputi	: Nurseto Budi Santoso, S.E.
Deputi	: Taufiqurrahman, S.H.
Deputi	: Devita Prihartini
Deputi	: A.S. Sukawijaya, S.E.

Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala	: H. Ali Muhammad Johan C, S.E.
Deputi	: Dina Lorenza Audria
Deputi	: Euis Widianingsih, S.E., M.M.
Deputi	: Ilham Mendrofa, S.P., M.M
Deputi	: Lis Dedeh, S.H., S.E., M.M
Deputi	: dr. Gobind Dialdas, M.H.A.

Badan Hukum dan Pengamanan Partai

Kepala	:
MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., C.L.A.	
Deputi	:
Ahmad Usmarwi Kaffah, S.H., LL.M. (GL), LL.M. (EL), Ph.D.	
Deputi	: H. Mehbob, S.H., M.H., C.N.

Deputi : M. Parulian S.

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen I Luar Negeri dan Keamanan Nasional

Kepala Departemen :

Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M.

Wakil : Dr. Susilawati, S.E., M.M., M.Si.
(Han).

Departemen II Politik dan Pemerintahann

Kepala Departemen : Umar Aarsal, S.Sos.

Wakil : Nurcahyo Anggoro Jati, S.E.

Departemen III Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kepala Departemen : Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H.

Wakil : Panti Silaban, S.Kom, S.H., M.H.

Departemen IV Pertanian, Kehutanan dan Kemaritiman

Kepala Departemen : Muslim, S.H.I., M.M.

Wakil : Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.

Departemen V Infrastruktur dan Perhubungan

Kepala Departemen :

Dr. Michael Wattimena, S.E., M.M

Wakil : Muhammad Nasir, S.H.

Departemen VI Perindustrian, Perdagangan dan Investasi

Kepala Departemen : Linda Megawati, S.E., M.Si.

Wakil : Elvira Sylviani Kaunang, S.T.,
M.M.

Departemen VII Energi, Lingkungan Hidup, Riset, dan Teknologi

Kepala Departemen : Rusda Mahmud

Wakil : Drs. Ayub Khan, M.Si.

Departemen VIII Agama dan Sosial

Kepala Departemen :

Dr. H. R. A. Munawar Fuad Noeh, M.Ag.

Wakil : Hj. Robiatul Adawiah, S.E.

Departemen IX Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Kepala Departemen : Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E.
Wakil : Kris Mandalina

Departemen X Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kepala Departemen : Dede Yusuf, M.E., S.T., M.Si., Pol.
Wakil : Anita Jacoba Gah, S.E.

Departemen XI Perekonomian Nasional

Kepala Departemen : Sartono Hutomo, S.E., M.M.
Wakil : Siti Mufattahah, S.Psi.

2.1.5 Perkembangan, Prestasi dan Kekuatan Partai Demokrat

Di tahun 2004, pada pemilihan umum Legislatif, Partai Demokrat meraih 8.458.825 suara dengan persentase 7,45% dan mendapatkan 56 kursi (10,18%) dari 550 Kursi di DPR. Partai Demokrat menduduki urutan 5 dalam perolehan suara pada saat pemilu. Ini merupakan prestasi yang signifikan bagi partai Demokrat yang pada saat itu tergolong sebagai partai pendatang baru. Partai Demokrat mencalonkan SBY dan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, Pasangan SBY-Jusuf Kalla memenangkan pemilu putaran pertama dengan perolehan suara 33,6% pada Juli 2004 yang kemudian memperoleh suara 60,1% di putaran kedua.

Di tahun 2005 pada bulan Mei, Partai Demokrat mengadakan kongres pertama dan Hadi Utomo terpilih sebagai ketua dan SBY tetap memegang kekuasaan tertinggi partai, yakni sebagai ketua dewan Pembina.

Selanjutnya di tahun 2009, partai Demokrat menduduki peringkat pertama di pemilihan legislatif dengan total perolehan suara 21.655.2195

(20,9%), kemudian mendapatkan perolehan kursi sebanyak 148 kursi (26,43%) dan menjadi partai terbesar di DPR. Partai Demokrat berhasil meraih suara paling banyak di beberapa provinsi yang bahkan tidak berlangsung di pemilu sebelumnya, mencakup di DKI Jakarta, Jawa barat, serta Aceh. Di pemilu presiden 2009, SBY memenangkan pemilihan umum presiden Bersama Boediono, mantan Gubernur Bank Indonesia menjadi wakilnya dengan perolehan suara 60,8% di putaran pertama.

Pada 30 Maret 2013, pasca Anas Urbaningrum mengundurkan diri, diadakan kongres luar biasa di Bali dengan tujuan guna menduduki kursi ketua. SBY memberikan calon serta terpilih dengan suara bulat tanpa lawan. SBY kemudian menetapkan Syarief Hasan sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Selanjutnya, Marzuki Alie dipilih untuk menggantikan Anas Urbaningrum sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi, sementara E.E. Mangindaan ditunjuk sebagai Ketua Harian Dewan Pembina.

Ditahun 2014, suara Partai Demokrat berkurang signifikan. Partai Demokrat hanya 12.724.509 dengan persentasi 10,19%, partai Demokrat juga kehilangan kursi lebih dari setengah di badan legislatif, yaitu hanya memperoleh 61 kursi (10,89%). Dikarenakan perolehan suara Partai Demokrat tidak melewati ambang batas yakni sebesar 20% gun mencalonkan diri dengan tidak berkoalisi, Dahlan Iskan, pemenang konvensi partai 2013 tidak jadi dicalonkan.

Pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulung SBY, diusung sebagai calon Gubernur DKI Jakarta oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai

Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berpasangan dengan Sylviana Murni. Sayangnya, AHY tidak berhasil mengalahkan Anies Baswedan dalam pemilihan tersebut.

Pada 17 Februari 2018, AHY secara resmi dilantik sebagai Komandan dari Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) oleh SBY dalam upaya persiapan Pemilu 2019 serta Pemilukada 2018. AHY sebagai Kogasma dan diberi kepercayaan untuk memimpin kemenangan Partai Demokrat dalam Pemilukada 2018 dan Pemilu Legislatif 2019. Dalam perannya, AHY sebagai juru kampanye utama partai Demokrat dan Mengonsolidasi kader di berbagai daerah untuk mendukung kemenangan calon yang diusung partai. Hasilnya, Partai Demokrat berhasil mencapai target awal sebesar 35 persen dari total 171 pemilihan pada Pemilukada 2018.

Pada Pemilu Legislatif 2019, Partai Demokrat awalnya menargetkan 15% suara, tetapi lalu menurunkannya menjadi 10%. Hasil akhirnya, partai ini meraih 7,77% suara dengan jumlah total suara 10.876.507 dan kehilangan beberapa kursi di legislatif. Partai Demokrat memperoleh total kursi 54 kursi (9,41%). Dalam Pilpres 2019, Partai Demokrat berkoalisi dengan partai-partai pendukung pasangan Prabowo-Sandi.

ditanggal 15 Maret 2020, AHY dipilih dengan aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025, menggantikan ayahnya dalam Kongres V di Jakarta. Pada awal masa kepemimpinannya, AHY menghadapi krisis dualisme dalam Partai Demokrat. Pada 5 Maret 2021, Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang sesudah memeberikan

kekalahan pada Marzuki Alie. Dalam sidang tersebut, nama Moeldoko dan Marzuki diajukan, dan hasil voting menunjukkan mayoritas dukungan peserta diberikan kepada Moeldoko. Pimpinan sidang, Jhoni Allen, mengumumkan bahwa Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025, sementara Marzuki Alie diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina. Dengan keputusan tersebut, AHY dinyatakan sebagai demisioner. Meski demikian, AHY yang sah sebagai Ketua Umum hasil Kongres V di Jakarta menegaskan bahwa Konferensi Luar Biasa (KLB) yang diadakan oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan konstitusi partai.

Pada awal 2023, Partai Demokrat memutuskan untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres pada Pemilu 2024, dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diajukan menjadi calon wakil presiden. Pada 3 Februari 2023, Demokrat secara resmi menetapkan Anies sebagai calon presiden dan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta NasDem, membentuk Koalisi Perubahan. Namun, muncul spekulasi bahwa jika AHY tidak terpilih sebagai pendamping Anies, Demokrat akan membatalkan kesepakatan koalisi, yang berpotensi menggagalkan terbentuknya Koalisi Perubahan. Sesudah keluar dari Koalisi Perubahan, Partai Demokrat didekati oleh PDI-P, yang berharap AHY memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo, dengan komunikasi intensif antara kedua pihak. Selain itu, Demokrat juga didekati oleh Koalisi Indonesia Maju, saat Prabowo mengadakan pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, pada 21 September 2023, di Jakarta Convention Center, AHY dan Partai

Demokrat mengumumkan dukungan mereka secara resmi untuk Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Menariknya, baik AHY ataupun Moeldoko pada akhirnya memberikan dukungan kepada calon presiden yang sama dalam pemilihan tersebut.

2.2. Kondisi Umum Perempuan di Partai Demokrat

2.2.1. Sejarah Keterlibatan Perempuan di Partai Demokrat

Sejarah keterlibatan perempuan di Partai Demokrat dapat ditelusuri sejak awal berdirinya partai ini pada tahun 2001. Pada masa-masa awal, seperti banyak partai politik lainnya di Indonesia, Partai Demokrat didominasi oleh kepemimpinan laki-laki. Namun, menyadari pentingnya inklusivitas dan representasi yang lebih luas, Partai Demokrat mulai membuka diri untuk melibatkan lebih banyak perempuan dalam struktur partainya. Hal ini menjadi bagian dari strategi partai untuk menarik dukungan dari segmen pemilih yang lebih luas, termasuk perempuan, yang sering kali merasa terpinggirkan dalam politik nasional.

Seiring dengan perkembangan waktu, Partai Demokrat mengadopsi berbagai langkah untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Salah satu langkah signifikan adalah dengan mengintegrasikan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Partai Demokrat mulai mendorong lebih banyak perempuan untuk mengambil peran aktif, baik sebagai anggota maupun sebagai pemimpin di berbagai departemen dan sayap organisasi partai. Dalam (Saputra, 2020) Partai Demokrat adalah sebuah partai politik yang secara konsisten mendukung keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Dukungan ini diwujudkan melalui Departemen Pemberdayaan

Perempuan dan Anak Partai Demokrat serta sayap Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI). Partai Demokrat juga telah menerapkan aturan untuk memastikan bahwa 30% dari pimpinan partai dan daftar calon legislatif adalah perempuan.

Selain itu, dalam menghadapi dinamika politik yang terus berubah, Partai Demokrat juga telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa isu-isu yang sesuai guna perempuan, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, menjadi bagian dari agenda utama partai (Purwanti, 2022). Kebijakan-kebijakan partai sering kali mencerminkan kepentingan dan keperluan perempuan, yang dibawa para tokoh perempuan dalam partai yang memiliki pemahaman mendalam mengenai isu-isu tersebut. Dengan demikian, keterlibatan perempuan tidak hanya dilihat sebagai strategi politik, tetapi sebagai komitmen partai terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam konteks yang lebih luas.

Terkait keterwakilan perempuan di Parlemen, hasil riset Bank Dunia tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 di Asia Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan asertif 30% belum membawa hasil yang diharapkan (Kulsum, 2024). Namun deklarasi 30% ini setidaknya telah membawa perubahan bagi perempuan di Kongres, dibandingkan pada masa orde lama dan baru. Untuk mencapai tujuan ideal 30% keterwakilan perempuan di DPR, perempuan Indonesia masih perlu melakukan banyak pekerjaan karena kehadiran perempuan di lembaga legislatif sangat penting guna memberikan peningkatan partisipasi politik perempuan.

Komitmen Partai Demokrat atas keterwakilan perempuan juga terlihat pada upayanya guna mencukupi kuota 30% perempuan di parlemen, sesuai dengan ketentuan undang-undang di Indonesia. Meskipun belum selalu mencapai angka ini, partai terus berusaha menciptakan kondisi yang memungkinkan lebih banyak perempuan terlibat dalam politik, baik melalui rekrutmen yang lebih inklusif maupun melalui program pengembangan kader. Dengan demikian, sejarah keterlibatan perempuan di Partai Demokrat adalah cerminan dari perjalanan panjang partai ini menuju politik yang lebih inklusif dan adil bagi semua.

Pada akhirnya, Partai Demokrat menyadari bahwa keberhasilan dalam politik modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan angka, tetapi juga oleh kualitas representasi yang mampu mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam Partai Demokrat, dengan segala tantangan dan peluangnya, merupakan bagian integral dari upaya partai untuk membangun politik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga negara, tanpa memandang gender (Zamhuri, 2023).

2.2.2. Peran dan Keterlibatan dalam Politik di Partai Demokrat

Keterwakilan perempuan di Partai Demokrat pusat telah menjadi sorotan penting dalam upaya partai ini untuk menciptakan politik yang lebih inklusif dan setara. Dalam sejarah politik Indonesia, keterlibatan perempuan dalam partai politik sering kali menghadapi berbagai hambatan, mulai dari budaya patriarki hingga minimnya akses terhadap sumber daya politik. Namun, Partai Demokrat telah menunjukkan komitmen untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan berbagai inisiatif yang bertujuan

meningkatkan partisipasi perempuan di semua tingkatan organisasi partai, khususnya di tingkat pusat.

Partai Demokrat, sejak awal berdirinya pada tahun 2001, menyadari bahwa keterwakilan perempuan bukan hanya soal memenuhi kuota, tetapi juga soal memastikan bahwa perempuan memiliki peran yang substansial dalam pengambilan keputusan. Partai Demokrat, yang konsisten dalam menerapkan kebijakan *affirmative action* dengan kuota 30% keterwakilan perempuan serta sistem zipper, telah berhasil meningkatkan peran perempuan di DPR (Mulyono, 2010). Ditahun 2009, dari 101 anggota DPR perempuan, 35 di antaranya berasal dari Partai Demokrat, yang setara dengan 34,65% dari total anggota DPR perempuan dan 23,5% persentasenya dari total keseluruhan anggota DPR RI terpilih dari Partai Demokrat. jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kursi yang diperoleh Partai Demokrat di DPR, persentase keterwakilan perempuan dalam partai ini masih belum yang tertinggi. Ini menunjukkan bahwa persentase kursi anggota DPR perempuan dalam suatu partai politik, ketika dibandingkan dengan total kursi yang dimiliki partai tersebut, baik untuk laki-laki ataupun perempuan, masih bisa ditingkatkan.

Tabel 2. 1
Distribusi Calon Legislatif Partai Demokrat tahun 2024

No	Daerah Pemilihan	Laki-laki		Perempuan		Total caleg
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	ACEH I	5	71%	2	29%	7
2	ACEH II	4	67%	2	33%	6
3	SUMATERA UTARA I	7	70%	3	30%	10
4	SUMATERA UTARA II	7	70%	3	30%	10
5	SUMATERA UTARA III	7	70%	3	30%	10
6	SUMATERA BARAT I	6	75%	2	25%	8
7	SUMATERA BARAT II	4	67%	2	33%	6
8	RIAU I	5	71%	2	29%	7
9	RIAU II	4	67%	2	33%	6
10	JAMBI	6	75%	2	25%	8
11	SUMATERA SELATAN I	6	75%	2	25%	8
12	SUMATERA SELATAN II	6	67%	3	33%	9
13	BENGKULU	3	75%	1	25%	4
14	LAMPUNG I	7	70%	3	30%	10
15	LAMPUNG II	7	70%	3	30%	10
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2	67%	1	33%	3
17	KEPULAUAN RIAU	3	75%	1	25%	4
18	DKI JAKARTA I	4	67%	2	33%	6
19	DKI JAKARTA II	5	71%	2	29%	7
20	DKI JAKARTA III	5	63%	3	38%	8
21	JAWA BARAT I	5	71%	2	29%	7
22	JAWA BARAT II	7	70%	3	30%	10
23	JAWA BARAT III	5	56%	4	44%	9
24	JAWA BARAT IV	4	67%	2	33%	6
25	JAWA BARAT V	6	67%	3	33%	9
26	JAWA BARAT VI	4	67%	2	33%	6
27	JAWA BARAT VII	6	60%	4	40%	10
28	JAWA BARAT VIII	5	56%	4	44%	9
29	JAWA BARAT IX	6	75%	2	25%	8
30	JAWA BARAT X	5	71%	2	29%	7
31	JAWA BARAT XI	7	70%	3	30%	10
32	JAWA TENGAH I	6	75%	2	25%	8
33	JAWA TENGAH II	4	57%	3	43%	7
34	JAWA TENGAH III	6	67%	3	33%	9
35	JAWA TENGAH IV	3	43%	4	57%	7
36	JAWA TENGAH V	5	63%	3	38%	8
37	JAWA TENGAH VI	5	63%	3	38%	8
38	JAWA TENGAH VII	3	43%	4	57%	7
39	JAWA TENGAH VIII	5	63%	3	38%	8
40	JAWA TENGAH IX	6	75%	2	25%	8
41	JAWA TENGAH X	5	71%	2	29%	7
42	DIY	6	75%	2	25%	8
43	JAWA TIMUR I	6	60%	4	40%	10
44	JAWA TIMUR II	5	71%	2	29%	7

No	Daerah Pemilihan	Laki-laki		Perempuan		Total caleg
		Jumlah	%	Jumlah	%	
45	JAWA TIMUR III	5	71%	2	29%	7
46	JAWA TIMUR IV	3	38%	5	63%	8
47	JAWA TIMUR V	5	63%	3	38%	8
48	JAWA TIMUR VI	6	67%	3	33%	9
49	JAWA TIMUR VII	5	63%	3	38%	8
50	JAWA TIMUR VIII	7	70%	3	30%	10
51	JAWA TIMUR IX	3	50%	3	50%	6
52	JAWA TIMUR X	3	50%	3	50%	6
53	JAWA TIMUR XI	3	38%	5	63%	8
54	BANTEN I	3	50%	3	50%	6
55	BANTEN II	4	67%	2	33%	6
56	BANTEN III	7	70%	3	30%	10
57	BALI	5	56%	4	44%	9
58	NUSA TENGGARA BARAT I	2	67%	1	33%	3
59	NUSA TENGGARA BARAT II	6	75%	2	25%	8
60	NUSA TENGGARA TIMUR I	4	67%	2	33%	6
61	NUSA TENGGARA TIMUR II	5	71%	2	29%	7
62	KALIMANTAN BARAT I	6	75%	2	25%	8
63	KALIMANTAN BARAT II	3	75%	1	25%	4
64	KALIMANTAN TENGAH	4	67%	2	33%	6
65	KALIMANTAN SELATAN I	4	67%	2	33%	6
66	KALIMANTAN SELATAN II	3	60%	2	40%	5
67	KALIMANTAN TIMUR	6	75%	2	25%	8
68	KALIMANTAN UTARA	2	67%	1	33%	3
69	SULAWESI UTARA	3	50%	3	50%	6
70	SULAWESI TENGAH	5	71%	2	29%	7
71	SULAWESI SELATAN I	5	63%	3	38%	8
72	SULAWESI SELATAN II	6	67%	3	33%	9
73	SULAWESI SELATAN III	5	71%	2	29%	7
74	SULAWESI TENGGARA	4	67%	2	33%	6
75	GORONTALO	2	67%	1	33%	3
76	SULAWESI BARAT	2	50%	2	50%	4
77	MALUKU	3	75%	1	25%	4
78	MALUKU UTARA	2	67%	1	33%	3
79	PAPUA	1	33%	2	67%	3
80	PAPUA BARAT	2	67%	1	33%	3
81	PAPUA SELATAN	2	67%	1	33%	3
82	PAPUA TENGAH	2	67%	1	33%	3
83	PAPUA PEGUNUNGAN	2	67%	1	33%	3
84	PAPUA BARAT DAYA	1	33%	2	67%	3
	TOTAL	379	65%	201	35%	580

Sumber: Diolah oleh Penulis dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tabel 2.2 menunjukkan distribusi jumlah calon legislatif Partai Demokrat tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin dan daerah pemilihan

(dapil). Secara keseluruhan, terdapat 580 caleg yang terdiri dari 379 laki-laki (65%) dan 201 perempuan (35%). Data ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebesar 30% yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Walaupun di beberapa dapil masih ada yang belum melampaui syarat keterwakilan perempuan.

Tabel 2. 2
Calon Legislatif Perempuan Partai Demokrat Terpilih Pemilu 2024

No	Nama	Dapil
1.	Nurwayah	DKI Jakarta III
2.	Cellica Nurrachadiana	Jawa Barat VII
3.	Harmusa Oktaviani	Jawa Tengah III
4.	Lucy Kurniasari	Jawa Timur I
5.	Dina Lorenza Audria	Jawa Timur III
6.	Tutik Kusuma Wardhani	Bali
7.	Anita Jacoba Gah	Nusa Tenggara Timur II
8.	Hillary Brigitta Lasut	Sulawesi Utara
9.	Faujia Helga Br. Tampubulon	Papua Barat Daya

Sumber: *diolah oleh penulis.*

Tabel di atas menunjukkan daftar beberapa calon legislatif perempuan dari Partai Demokrat untuk Pemilihan Umum 2024 di berbagai daerah pemilihan (Dapil). Para caleg ini berasal dari berbagai wilayah strategis, mulai dari DKI Jakarta hingga Papua Barat Daya. Sebagai contoh, Nurwayah mewakili DKI Jakarta III, sementara Cellica Nurrachadiana maju dari Jawa Barat VII. Lucy Kurniasari dikenal sebagai salah satu tokoh yang mewakili Jawa Timur I, sedangkan aktris Dina Lorenza Audria bertarung di Dapil Jawa Timur III. Beberapa daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara juga memiliki perwakilan caleg perempuan yang potensial seperti Anita Jacoba Gah dan Hillary Brigitta Lasut.

Di tingkat pusat, perempuan di Partai Demokrat tidak hanya

menduduki posisi sebagai anggota parlemen, tetapi juga memiliki peran penting dalam struktur organisasi partai. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, misalnya, memiliki beberapa tokoh perempuan yang menjabat sebagai ketua departemen strategis, seperti Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Departemen Sosial dan Kesejahteraan Rakyat. Tokoh-tokoh perempuan ini tidak hanya berperan dalam merumuskan kebijakan internal partai, tetapi juga dalam mempengaruhi arah kebijakan publik yang responsif terhadap isu-isu perempuan.

Namun, meskipun ada peningkatan dalam keterwakilan perempuan, Partai Demokrat juga menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah menciptakan ekosistem politik yang benar-benar mendukung perempuan untuk maju. Sering kali, perempuan harus menghadapi hambatan kultural dan sosial yang menghalangi mereka untuk terlibat secara penuh dalam politik. Di Indonesia, yang menerapkan sistem nilai patriarki, kesempatan bagi perempuan untuk berkarir sebagai politisi cenderung terbatas. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang seringkali menganggap peran perempuan terbatas pada pekerjaan rumah tangga, sehingga membatasi keterlibatan mereka dalam bidang politik (Karam et al., 2002).

Untuk mengatasi hambatan ini, Partai Demokrat telah memperkenalkan berbagai program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan yang dirancang khusus untuk perempuan. Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan politik, mentorship, serta akses terhadap

jaringan yang lebih luas. Misalnya, Partai Demokrat bekerja sama dengan berbagai organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional untuk mengadakan pelatihan kepemimpinan bagi kader perempuan di tingkat pusat dan daerah. Tujuannya adalah untuk membekali perempuan dengan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di dunia politik yang kompetitif, serta guna memberikan kepastian jika mereka mempunyai dukungan yang memadai guna meraih posisi-posisi strategis.

Selain pelatihan, Partai Demokrat juga melakukan reformasi internal untuk memastikan bahwa proses rekrutmen dan promosi dalam partai lebih inklusif terhadap perempuan. Langkah-langkah ini termasuk peninjauan ulang terhadap prosedur seleksi calon legislatif dan eksekutif, serta pengenalan kebijakan yang mendukung keseimbangan gender di semua tingkatan organisasi (Karam et al., 2002). Dengan langkah-langkah ini, Partai Demokrat berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perempuan untuk terlibat secara penuh dalam politik.

Secara keseluruhan, keterwakilan perempuan di Partai Demokrat pusat adalah bukti komitmen partai terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, kemajuan yang telah dicapai menunjukkan bahwa Partai Demokrat serius dalam upayanya untuk menciptakan politik yang lebih inklusif. Dengan terus mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dan memastikan bahwa perempuan memiliki peran yang substansial dalam pengambilan keputusan, Partai Demokrat berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang lebih adil dan setara di Indonesia.